Radar Bali

Kepala BI Ingin Berbagi Program

NEGARA - Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bali Dewi Setyowati Rabu (25/3) siang sowan ke Jembrana dan bertemu dengan Bupati Jembrana I Putu Artha di Ruang VIP Bupati Jembrana. Kedatangan Kepala BI Perwakilan Provinsi Bali ini ingin berbagi program dengan Pemkab Jembrana pada bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pengentasan kemiskinan.

Dewi Setyowati perempuan pertama yang menjabat Kepala BI di Provinsi Bali ini, menilai di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat, perlu mendapat penanganan serius dan pengelolaan dengan baik agar ketersedian kebutuhan pokok masyarakat dapat di angkau oleh masyarakat bawah. Dewi Setyowati mengaku tertarik dengan surplus beras yang dimiliki Kabupaten Jembrana. " Kondisi ini harus dijaga dan bila perlu ditingkatkan lagi " kata Setyowati. Ia juga menuturkan dari kunjungannya ke semua Kabupaten / Kota dan bertemu dengan Bupati/Walikota seBali, ada satu kabupaten yang menjual padi petani ke luar daerah, hingga untuk masyarakatnya sendiri tidak tersedia. Selain itu Setyowati juga mengapresiasi program bedah rumah Pemkab Jembrana setiap tahun 200 unit dengan nilai Rp. 15 juta per unitnya. Pihaknya mendukung program tersebut, bahkan dalam waktu ia akan mengkoordinasikan kepada perbankan terutama yang membuka kantor di Jembrana untuk ikut serta membantu Pemkab Jembrana dalam mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu Bupati Jembrana I Putu Artha menyebutkan, untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah pada saat panen raya, pihaknya telah mencairkan dana talangan kepada petani melalui perpadi dengan pola kerjasama tri partid yaitu Petani, PNS dan Perpadi. Selain itu Bupati Artha juga mengungkap potensi kelompok tenun cagcag yang memproduksi kain endek khas Jembrana di Kelurahan Sangkaragung yang saat ini dibina oleh salah satu Bank Pemerintah di Jembrana. Bupati Artha berharap BI turut membantu masyarakat Jembrana dalam meningkatkan perekonomian. " Jembrana jangan dilupakan, meskipun miskin pendapatannya tetapi masyarakat miskinnya setiap tahun mampu kita entaskan minimal 200 KK, kedepan tetap memerlukan bantuan " kata Artha. Ia juga meminta dukungan BI untuk menyampaikan Pengusaha Perbankan di Jembrana untuk ikut membantu Pemkab dalam mengentaskan kemiskinan. **(gup)**

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 29

Radar Bali

Panggil 20 Saksi, Dalami TPPU

Sidang Kasus Dermaga Gunaksa

DENPASAR - Sebanyak 20 saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (26/3). Mereka dijadikan saksi untuk terdakwa kasus korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Wayan Candra. Baik majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi maupun jaksa lebih banyak mendalami tentang TPPU ■

▸ Baca **Panggil...** Hal 31

Beli Tanah Atas Nama Kakaknya

■ **PANGGIL...**

Sambungan dari hal 21

yang dilakukan mantan bupati Klungkung tersebut. Salah satu saksi yang dimintai keterangna adalah Ketut Beneng. Namanya muncul dalam transaksi di rekening Candra. Namun Beneng mengaku tidak terkait. "Ada teman yang meminjam SIM saya, untuk mencairkan cek. Saya waktu itu tidak membawa KTP, akhirnya SIM saya yang dipakai. Yang menerima uangnya Pak Latra namanya," jelasnya lugu.

Kemudian ada saksi bernama Bujana, yang adalah pengusaha mebeler. Dia tercatat ada transaksi dari rekening Candra Rp 50 juta. Bujana mengatakan, dana itu adalah pembayaran mebel, korden dan pernak - pernik lain untuk ruang dinas Candra. Dengan nilai Rp 50 juta. "Apakah saksi mensuplai untuk keperluan dinas atau pribadi?" tanya Jaksa Made Pasek Antara. "Untuk dinas, di rumah jabatan Bupati," jawab Bujana.

"Kenapa dibayar dari rekening Candra?" desak lagi Jaksa. Atas pertanyaan ini Bujana menjawab dengan enteng." Yang penting dibayar, mau dari mana saya tidak masalah," kilahnya.

Menarik lagi kesaksian dari PNS Kantor Camat Klungkung benama Dewa Suarbawa. Dia punya teman bernama Wayan Sukariana yang memiliki lahan di Jumpai, kemudian dibeli oleh Candra dengan nilai Rp 280 juta. Namun apes, Candra sangat lama tidak membayar. Akhirnya Dewa yang diminta bantuan untuk meminta pembayaran ke Candra.

Dewa akhirnya minta tolong ke Sekcam Suminaya, yang kebetulan satu banjar dengan Candra. "Akhirnya dibayar. Ceknya dikasi saya lewat staf Pak Candra Setiyawati. Makanya saya tercatat mencairkan cek dari Pak Candra," jelas Dewa.

Tanah itu diatasnamakan kakak dari Candra bernama Megeg.

Seperti halnya berita sebelumnya, nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218.

"Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal - usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218," tegas Jaksa. **(art/yes)**

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 21 dan 31

Radar Bali

IST.

SEPAKAT: Perwakilan BI bertemu dengan Bupati Jembrana I Putu Artha di Ruang VIP Bupati Jembrana kemarin.

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 29

Radar Bali

Petinggi Kemenhut Datangi Buleleng

Bantah Terkait Investasi di Pulau Menjangan

SINGARAJA – Dua orang petinggi di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan, Kamis (26/3) kemaring mendatangi Pemkab Buleleng. Diduga pertemuan itu terkait dengan rencana investasi di Pulau Menjangan, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak.

Dua orang petinggi itu adalah Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Novianto Bambang, serta Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Bambang Supriyanto. Mereka diterima Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, dan langsung melakukan pertemuan tertutup di ruang kerja Wabup. Setelah melangsungkan pertemuan tertutup selama kurang lebih sejam, kedua pejabat itu keluar ruangan, namun sempat menolak memberikan keterangan pers. Namun setelah didesak, akhirnya bersedia memberikan keterangan.

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bambang Supriyanto mengatakan, kedatangannya hanya terkait rencana pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), sebagai kawasan konservasi. Termasuk membicarakan rencana pengelolaan berdasarkan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Bambang membantah jika kedatangannya terkait dengan rencana investasi di Pulau Menjangan. Ia mengatakan rencana investasi itu sama sekali tak dibahas, dalam pertemuan itu, karena masih dibahas di Kementerian Kehutanan. "Itu akan dibahas belakangan. Tadi *nggak* ada bicara masalah itu," katanya.

Pihak Kemenhut mengklaim saat ini proposal pengajuan Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA), masih dalam kajian secara mendalam. Nantinya kajian juga mencantumkan pendapat dari pemerintah daerah, masyarakat setempat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup. **(eps/gup)**

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 31

Radar Bali

Tak Perlu Izin Gubernur

Penahanan Anggota DPRD Jembrana

. **NEGARA** - Anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jembrana, I Made Sueca Antara segera ditahan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Jembrana. Langkah ini kian dekat karena penahanan anggota DPRD tidak perlu mendapat izin Gubernur Bali. Sementara penetapan pengadilan berkaitan dengan penyitaan dokumen berupa SK Pengangkatan Made Sueca Antara sebagai anggota DPRD Jembrana periode 2009-2014 dan 2014-2019 sudah turun sejak Kamis kemarin (26/3).

Kapolres Jembrana, AKBP Harry Haryadi melalui Kasat Reskrim, AKP Gusti Made Sudarma Putra mengatakan, guna memperecepat proses mendapatkan surat izin penahanan anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara, pihaknya jemput bola dengan meminta petunjuk Gubernur Bali. Dari konsultasi yang dilakukan di Kantor Gubernur Bali tersebut diperoleh informasi kalau penahanan seorang anggota DPRD Kabuaten tidak perlu dengan surat izin Gubernur Bali.

"Memang secara resmi tidak perlu ada surat izin gubernur untuk menahan seorang anggota DPRD Kabupaten. Kami hanya membuat laporan setelah melakukan penahanan. Ini dilakukan sebagai landasan administrasi di Kantor Gubernur. Hal ini makin mempermudah proses penahanan anggotaDPRD Jembrana tersebut," kata Sudarma Putra kemarin.

Sementara itu berkas kasus korupsi penggunaan BBM bersubsidi dengan tersangka Made Sueca Antara segera rampung. Karena penetapan pengadilan terhadap penyitaan SK pengangkatan Sueca Antara selaku anggota DPRD Jembrana sudah turun per Kamis kemarin (26/3). **(don/yes)**

Edisi : Jumat, 27 Maret 2015

Hal : 31.